

2022

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KOTA JAKARTA TIMUR



JAKARTA, JANUARI 2023

BNN Kota Jakarta Timur

Jalan Dr. Sumarno - Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur 13950

Telp / Fax: 021-4800974

Email : bnnkotajakartatimur@gmail.com

Website: jaktimkota.bnn.go.id

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Timur menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020. Sebagai penjabaran tugas, telah disusun Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalah-gunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dituangkan dalam perjanjian kinerja, dengan sasaran kinerja yaitu meningkatnya Pelaksanaan P4GN secara efektif di Provinsi DKI Jakarta, dimana untuk mencapai sasaran kinerja tersebut diukur dari indikator kinerja.

Dari 10 (Sepuluh) indikator Kinerja BNNK Jakarta Timur Tahun Anggaran (TA) 2022, semua dilaksanakan sesuai target (100%). Pada TA 2022 BNNK Jakarta Timur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.907.199.000,- (*satu milyar sembilan ratus tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) dan telah diserap hingga 96,40%.

Secara ringkas dilaporkan bahwa pada TA 2022, BNNK Jakarta Timur telah melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan Penetapan Kinerja. Realisasi capaian kinerja program BNN Jakarta Timur TA 2022 sebesar 106,32% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang sebesar 99,17%, maka terjadi kenaikan kinerja sebesar 7,15%. Adapun kenaikan sebesar 7,15% tersebut disebabkan karena faktor perencanaan program dan kegiatan yang matang, pelaksanaan program yang terkoordinasi dengan baik dan menjaga komunikasi yang terus dibangun setelah kegiatan dilaksanakan.

Sementara itu, capaian realisasi penyerapan anggaran TA 2022 telah diserap sebanyak 96,40% dari anggaran sebesar Rp. 1.907.199.000,- (*satu milyar sembilan ratus tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) dimana seluruhnya merupakan belanja barang. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran TA 2021 yang terealisasi 96,34%, maka terjadi kenaikan penggunaan anggaran sebesar 0,06%. Adapun kenaikan sebesar 0,06% tersebut disebabkan karena faktor meningkatnya kepatuhan dan disiplin dalam kinerja penyerapan anggaran yang memperhatikan kebutuhan, waktu, ketepatan pembayaran dan kevalidan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Menyadari masih terdapat banyak permasalahan P4GN di wilayah administrasi kota Jakarta Timur, maka kinerja program dan kegiatan serta kinerja anggaran akan terus dipacu untuk memberikan manfaat bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada prioritas nasional demi terwujudnya wilayah kota Jakarta Timur yang bersih narkoba (bersinar) menuju Indonesia Bersinar melalui strategi dan implementasi *war on drugs* (perang melawan narkoba) pada 2023.

KATA PENGANTAR

Dengan mengharap Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat menerbitkan LAKIP BNNK JAKTIM 2022 atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Timur tahun 2022 ini, yang capaiannya diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat dan kita semua, sehingga dari tahun ke tahun menumbuhkembangkan hasil nyata bagi masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas narkoba.

Dengan terbitnya laporan ini, menandakan Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Timur tahun 2022 telah melaksanakan azas akuntabilitas seperti yang tertuang dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan bahwa penyelenggara negara harus mempertanggung-jawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan kepada masyarakat.

LAKIP BNNK JAKTIM 2022 ini merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Timur tahun 2022 sebagai hasil akhir setiap program dan kegiatan kepada masyarakat, dimana TA 2022 ini berhasil dicapai kinerja sebesar 106,32% atau naik 7,15% dibanding kinerja program TA 2021 yang sebesar 99,17%, sementara realisasi anggaran TA 2022 dicapai sebesar 96,40% atau naik 0,06% jika dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran TA 2021 yang sebesar 96,34%.

Akhir kata, kami berharap agar LAKIP BNNK JAKTIM 2022 ini dapat memicu dan memacu kinerja Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Timur tahun 2022, menuju terwujudnya masyarakat kota Jakarta Timur yang bersih Narkoba (Bersinar). Atas semua prestasi ini kami mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih kepada semua pihak. Mari bersama-sama saling mendorong dan membangkitkan masyarakat untuk bersatu, berdaya dalam P4GN, menuju bangsa Indonesia yang sehat, sejahtera, maju dan jaya.

Jakarta, Januari 2023

Kepala BNNK Jakarta Timur



Hendrajid Putut Widagdo, S.Sos., MM., M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang	6
B. Dasar Hukum.....	7
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	8
D. Struktur Organisasi.....	10
E. Sistematika.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Perencanaan Strategis	11
B. Penetapan Kinerja Tahun 2021.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BNNK JAKARTA TIMUR TAHUN 2021.....	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Realisasi Anggaran.....	28
BAB IV PENUTUP.....	30
A. Kesimpulan.....	30
B. Saran.....	31

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	12
Tabel 3.1.....	13
Tabel 3.2.....	15
Tabel 3.3.....	17
Tabel 3.4.....	18
Tabel 3.5.....	20
Tabel 3.6.....	21
Tabel 3.7.....	22
Tabel 3.8.....	24
Tabel 3.9.....	25
Tabel 3.10.....	26
Tabel 3.11.....	27
Tabel 3.12.....	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.....	10
Gambar 3.1.....	15
Gambar 3. 2.....	17
Gambar 3. 3.....	18
Gambar 3. 4.....	20
Gambar 3. 5.....	20
Gambar 3. 6.....	21
Gambar 3. 7.....	23
Gambar 3. 8.....	24
Gambar 3. 9.....	25
Gambar 3. 10.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didasari pada lima visi prioritas kerja Presiden RI, yang berkomitmen untuk mewujudkan dan penegakkan hukum yang berkeadilan, maka BNN RI menekankan dua prioritas, yaitu: (1) Mendorong Badan Narkotika Nasional lebih memfokuskan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam pemberantasan narkoba; dan (2) Berkomitmen mendukung upaya program percepatan penyederhanaan reformasi birokrasi di lingkungan BNN demi mewujudkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN), percepatan sistem kerja, dan fokus pada pekerjaan fungsional, serta mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai pemerintah.

Oleh karenanya, berkaitan dengan kebijakan tersebut perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan program prioritas nasional yang berkaitan langsung dengan sasaran pada tingkat operasional, seperti perlunya pendidikan anti narkoba yang diberikan sejak dini melalui lembaga pendidikan formal maupun non formal dengan memasukkan kurikulum tentang pengetahuan bahaya narkoba dengan cara sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan secara intensif dan berkesinambungan, terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, BNN bertugas melakukan P4GN melalui berbagai kegiatan Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, Bidang Pemberantasan, dan Bidang Hukum dan Kerja sama secara terpadu dan bersinergi dengan seluruh komponen bangsa, yang dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 khususnya terkait menjaga stabilitas keamanan nasional serta penegakan hukum sebagai perwujudan visi dan misi serta nawa cita Presiden RI.

Sebagai wujud dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tersebut, Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Timur telah memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi di lingkungan Instansi Pemerintah Kota Jakarta Timur dan mengimplementasikan dalam bentuk kegiatan mengajak seluruh lapisan masyarakat, tokoh agama (kerjasama lintas agama), mahasiswa, pelajar, maupun

pekerja, pegawai negeri, TNI dan Polri untuk bersinergi menggalang kekuatan untuk memerangi peredaran gelap dan penyalahguna narkoba di wilayah Kota Jakarta Timur.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan hasil Survey BNN dan LIPI 2019, provinsi DKI Jakarta menduduki ranking ketiga terbesar jumlah penyalahguna Narkotika secara nasional dengan angka prevalensi pecandu narkoba sebesar 4,9% atau ± 195.367 pecandu. Jika di rata-rata, maka Kota Jakarta timur yang terdiri dari 65 kelurahan, diestimasikan jumlah pecandu sebesar ± 47.580 orang. Namun dari jumlah tersebut masih sangat sedikit yang melakukan rehabilitasi (asesmen).

Diharapkan melalui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori bagi Pecandu Narkotika dapat mendorong para penyalahguna atau pecandu narkoba melaporkan diri untuk selanjutnya memperoleh perawatan sebagai salah satu sarana untuk melawan jaringan sindikat narkoba dengan cara mengurangi permintaan akan narkoba atau tanpa melalui penegakan hukum.

Penyebaran narkoba di wilayah Kota Jakarta Timur semakin luas di berbagai kalangan, lingkungan dan kawasan. BNN Kota Jakarta Timur bersama Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah berupaya untuk menekan penyebaran narkoba di wilayah Jakarta Timur, baik di lingkungan kerja pemerintah (terutama Lapas dan Rutan), Lingkungan Dunia usaha (terutama sector pertambangan), lingkungan Kampus (terutama PT Swasta) dan Lingkungan masyarakat (terutama di kawasan kelurahan rawan narkoba di Jakarta Timur seperti: Kel. Susukan dan Kel. Pinang Ranti (makasar), Kel. Pondok Ranggon (Cipayung), Kel. Ciracas, dll.

B. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Kepala BNN Nomor : KEP/388/XII/2015/BNN tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN; dan
8. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK disebutkan bahwa BNNK Jakarta Timur merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang berada di bawah naungan BNNP DKI Jakarta yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.

2. Tugas

BNNK Jakarta Timur mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kota Jakarta Timur, seperti diatur dalam dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020, meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal P4GN;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat serta memantau dan mengarahkan kegiatan masyarakat dalam P4GN;
- f. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika;
- g. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika; dan

h. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BNNK Jakarta Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di seksi pencegahan pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Kota Jakarta Timur;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di seksi pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Kota Jakarta Timur;
- c. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kota Jakarta Timur;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintahan terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota Jakarta Timur;
- e. pelaksanaan administrasi BNN Kota Jakarta Timur; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Kota Jakarta Timur.

4. Kewenangan

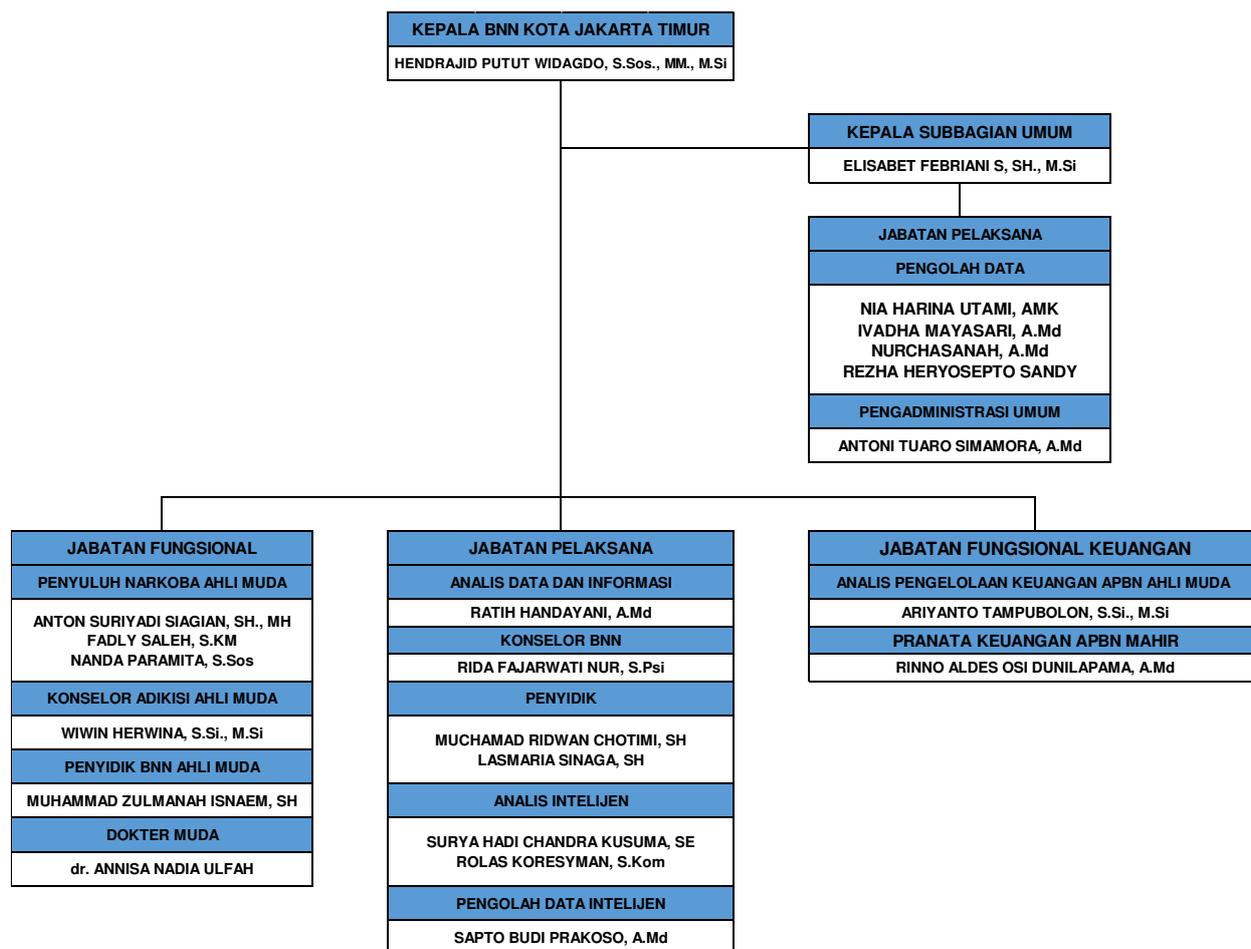
Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN No. 6 Tahun 2020, Kewenangan BNNK Jakarta Timur pada dasarnya adalah melaksanakan kewenangan BNN yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Timur tahun 2022 terdiri atas:

1. Kepala ;
2. Kepala Sub Bagian Umum ;
3. Sub Koordinator Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat ;
4. Sub Koordinator Seksi Rehabilitasi ;
5. Sub Koordinator Seksi Pemberantasan ;
6. Jabatan Fungsional Tertentu ; dan
7. Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI BNNK JAKARTA TIMUR



Gambar 1.1. Struktur Organisasi BNN Kota Jakarta Timur

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BNNK Jakarta Timur ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Perencanaan Kinerja
- Bab III Akuntabilitas Kinerja
- Bab IV Penutup
- Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang beresiko tentang masa depan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang antisipatif dan mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, maka setiap satuan kerja di lingkungan BNN Kota Jakarta Timur harus terus menerus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpedoman kepada rencana strategi. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Kepala BNN untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian misi dan tujuannya serta memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*), dan meminimalisir kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*), yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang di hadapi saat ini.

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

Penetapan Kinerja adalah merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dan disusun sendiri oleh pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja atau penerima amanah dan disetujui oleh pejabat atasannya. Penetapan Kinerja BNNK Jakarta Timur TA 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BNNK Jakarta Timur**Kementerian/Lembaga : Badan Narkotika Nasional RI****Tahun Anggaran : 2022****Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja BNNK Jaktim TA 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA & SATUAN	TARGET
1. Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkotika	51,00
2. Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkotika	78,67
3. Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkotika secara berkelanjutan	Nilai keterpulihan kawasan rawan yang diintervensi	2,50
4. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi	3,10
5. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	4
6. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi	6
7. Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi	3,3
8. Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1
9. Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88
10. Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BNNK JAKARTA TIMUR

A. Capaian Kinerja Organisasi

Perjanjian Kinerja BNNK Jakarta Timur tahun 2022 menetapkan 10 (sepuluh) sasaran strategis yang akan dicapai, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 10 (sepuluh) indikator. Berikut ini dijelaskan realisasi capaian Kinerja BNNK Jakarta Timur sebagaimana tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1. Realisasi Capaian Kinerja BNNK Jaktim TA 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA & SATUAN	TARGET	CAPAIAN	PROSEN
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	51,00	50,5	99,02%
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	78,67	84,27	107,12 %
Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai keterpulihan kawasan rawan yang diintervensi	2,50	3,48	139,20 %
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi	3,10	3,27	105,48 %
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	4	4	100,00 %
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah Provinsi	6	6	100,00%
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi	3,3	3,3	100,00%
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1	1	100,00%
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	88	96,40	109,55%
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95	97,67	102,81%
Total Capaian				106,32%

Secara kuantitas, tabel 3.1. menjelaskan bahwa capaian indikator kinerja sebesar 106,32% dari perhitungan rata-rata prosentase realisasi Indikator Kinerja Utama. Namun Secara kualitas sesungguhnya beberapa indikator sesungguhnya melampaui target dari yang ditargetkan, antara lain: (1) indeks ketahanan keluarga melampaui target, yaitu sebesar 84,27 atau 107,12%; (2) Indeks kemandirian partisipasi (IKP) sebesar 3,27 atau 105,48%; (3) Indeks kemandirian keterpulihan kawasan rawan (IKKR) sebesar 3,48 atau 139,20% (4) Nilai Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kota Jakarta Timur (nilai) sebesar 97,67 atau 102,81%.

Capaian kinerja program tahun anggaran (TA) 2022 sebesar 106,32%, maka jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun anggaran (TA) 2021 yang sebesar 99,17%, terjadi kenaikan sebesar 7,15%. Adapun beberapa faktor yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain:

1. Tumbuhnya konsolidasi yang solid diantara sub satker, dimana pada setiap bagian koordinator terjadi komunikasi yang bagus yang dilakukan saat zoom meeting yang secara rutin digelar setiap hari selasa setiap pekan, dimana masing-masing anggota dalam sub koordinator dan anggota tersebut saling memberikan masukan dan solusi;
2. Meningkatnya koordinasi antara BNNK yang diwakili masing-masing sub koordinasi dengan stakeholder (lingkungan kerja pemerintah dan OPD) dan mitra kerja (dunia usaha, lingkungan pendidikan dan orsosmas), dimana setiap permasalahan dan kebutuhan P4GN yang disampaikan dalam forum diskusi dalam berbagai acara, baik acara audiensi, penyuluhan, rapat, deteksi dini, pembekalan dan beragam forum pertemuan baik daring maupun luring;
3. Pembinaan yang intensif oleh pembina P4GN di BNN RI dan BNNP yang secara rutin mengundang masing-masing sub koordinator untuk menambah pengetahuan, wawasan, membuka ruang diskusi dan memberikan juklak dan juknis yang meningkatkan kerja dan kinerja dalam P4GN;

Dari hasil monitoring dan evaluasi baik kerja dan kinerja di masing-masing subkoordinator dalam mengimplementasi program dan anggaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1

Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Dari hasil monitoring dan evaluasi baik kerja dan kinerja di masing-masing Sub Koordinator dalam mengimplementasi program dan anggaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Indeks Ketahanan Diri Remaja BNNK Jaktim TA 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosen
1.	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	51,00	50,5	99,02

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah melalui Pengukuran Ketahanan Diri Anti Narkoba pada Remaja sebagai “Kemampuan remaja untuk mengendalikan diri, menghindari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba”.

Alat untuk mengukur Indeks Ketahanan Diri Remaja telah dilaksanakan oleh Deputy Pencegahan BNN melalui metode ADS (*Anti Drugs Scale*). Alat ukur ADS ini terdiri dari 3 (tiga) dimensi, yaitu *self regulation*, *assertiveness*, dan *reaching out* yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kemampuan individu dalam menghadapi dorongan, keinginan dan memiliki kemampuan pengetahuan pada indikasi atau dampak pengaruh buruk dari penyalahgunaan Narkoba. Metode ini menggunakan basis Aplikasi ADS yang digunakan dengan kuesioner sebanyak 47 (empat puluh tujuh) pertanyaan ADS dan 28 (dua puluh delapan) pertanyaan *predictor* secara *mobile* serta secara *online*. Capaian di BNNK Jakarta timur sebesar 50,5.

Faktor pendukung dalam menyelenggarakan pengukuran Indeks Ketahanan Diri Remaja adalah sebagai berikut : (1) Terciptanya kekuatan dalam diri remaja untuk menolak narkoba; (2) Tersampainya informasi bahaya penyalahgunaan narkoba pada rekan teman sebaya.



Gambar 3.1 Kegiatan P2M Indeks Ketahanan Remaja

2

Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Keluarga dinilai menjadi alternatif pencegahan paling efektif dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, meningkatkan daya tangkal keluarga sangat diperlukan untuk mencegah pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Untuk mengukur peningkatan daya tangkal tersebut, perlu diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkotika dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain Pendampingan program ketahanan keluarga. Untuk TA 2022 ini, BNN ditantang untuk mampu memenuhi target indeks ketahanan keluarga minimal 78,67%.

Adapun target sasaran dalam pendampingan, terdiri atas 2 kelurahan yaitu Kelurahan Penggilingan dan Kelurahan Pulo Gebang untuk mengetahui hasil atau *outcome* dari pelaksanaan kegiatan maka dilakukan metode pengukuran yang digunakan melalui Aplikasi survey Indeks Ketahanan Keluarga Deputy Pencegahan.

Kegiatan yang dilakukan untuk mengukur indeks tersebut dilakukan dengan melibatkan peran keluarga dalam program ketahanan keluarga anti narkotika untuk memastikan kelangsungan hidup sehat dari penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan yang secara langsung dilakukan oleh BNN Kota Jakarta Timur dalam meningkatkan keterlibatan keluarga adalah dengan metode, sebagai berikut:

1. Keluarga yang diberikan
2. Pemahaman perihal Anti Narkotika dan teknik komunikasi di dalam ketahanan.
3. Peserta terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang saling memiliki konsistensi dalam berkomunikasi kesehari-harian pada kehidupan keluarga.
4. Fasilitasi pelaksanaan program ketahanan keluarga anti narkotika anti narkotika.
5. Intervensi ketahanan keluarga berbasis sumber daya pembangunan desa.

Tabel 3.3. Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Jaktim TA 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosen
2.	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	78,67	84,247	107,12%

Adapun capaian dalam pengukuran daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di BNNK Jakarta Timur TA 2022

secara kualitas melampaui dari target 78,67 (100%) yaitu mencapai 84,247 (107,12%).



Gambar 3.2. Kegiatan P2M Indeks Ketahanan Keluarga

3

Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan

Permasalahan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Jakarta Timur adalah keberadaan kawasan rawan narkoba yang tersebar dan terisolasi dari program P4GN. Dari kawasan inilah sindikasi narkoba dilancarkan dan beragam modus operandi disebarkan untuk mengancam lingkungan dan kawasan di sekitarnya. Penanganan kawasan ini melalui intervensi kewirausahaan diharapkan memulihkan kondisi bersih bersih narkoba dan mengangkat citra kawasan ini sebagai pusat industri kreatif masyarakat.

Untuk memulihkan kawasan rawan ini diperlukan intervensi pemberdayaan alternatif dengan upaya pembinaan *life skill* dan pengukuran Indeks Keterpulihan Kawasan Rawan (IKKR) Narkoba yang terdiri dari 2 variabel (keterpulihan dan kewirausahaan) dan 20 indikator (13 indikator keterpulihan dan 7 indikator kewirausahaan). Selanjutnya, hasil pemantauan kuesioner tersebut dihitung dan menghasilkan skala IKKR. Dari skala IKKR inilah kondisi keterpulihan dikategorikan dalam 4 macam, yaitu : (1) pulih dan hidup usaha, (2) rawan tetapi hidup usaha, (3) pulih tapi tidak hidup usaha dan (4) rawan dan tidak hidup usaha.

Adapun metode pemberdayaan alternatif yang dilakukan antara lain: (1) melakukan pemetaan potensi dan merencanakan kegiatan *life skill*, (2) penunjukkan pendamping dan pemilihan peserta oleh pendamping dari kawasan rawan, (3) membangun sinergi dengan instansi pemerintah dan kemitraan dengan dunia usaha

dan orsosmas; (4) membuat kegiatan bimtek yang sesuai dengan kondisi faktual dan aktual yang menstimulasi usaha dan peningkatan kesejahteraan; (5) monitoring melalui kuesioner IKKR kepada pendamping dan peserta dan (6) pembinaan keberlanjutan melalui P4GN (penyuluhan, deteksi dini, rehabilitasi (IBM), pelaporan, razia dan pembinaan UMKM.

Dari kegiatan yang berlokasi di kelurahan Kebon Manggis kampung rawan narkoba dengan intervensi life skill budidaya maggot, diperoleh capaian sebagai berikut: 3,48 atau 139,20%

Tabel 3.4. Nilai keterpulihan kawasan rawan yang diintervensi BNNK Jaktim TA 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosen
3.	Nilai keterpulihan kawasan rawan yang diintervensi	2,50	3,48	139,20%

Dari tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa target skala IKKR yang seharusnya dicapai 2,50 berhasil dilaksanakan keterpulihan dan kewirausahaan di kawasan rawan tersebut sebesar 3,48 atau melebihi target sebesar 139,20%. Adapun secara kualitas, capaian riil di lapangan, wilayah tersebut berada dalam kondisi Pulih dari derajat BAHAYA (2,50) menjadi AMAN (3,48) dengan capaian riil masyarakat terus mengembangkan budidaya maggot untuk meningkatkan skill dan pendapatan.



Gambar 3.3. Pelatihan Life Skill Budidaya Maggot bagi Masyarakat Kawasan Rawan Narkoba di Kel. Kebon Manggis – Jakarta Timur

4

Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Salah satu kunci keberhasilan program P4GN adalah dengan meningkatnya peran serta yang diwujudkan dalam kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN di lingkungannya. Untuk meningkatkan upaya tersebut BNNK melalui kegiatan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat membentuk dan Membina Penggiat P4GN yang mampu mengukur indeks Kemandirian Masyarakat (IKM) di lingkungannya, untuk melihat sejauh mana kemandirian masyarakat (sadar dan peduli) menangani P4GN di lingkungannya.

Indeks Kemandirian Masyarakat (IKM) dalam pelaksanaan P4GN adalah akumulasi jumlah indeks (indikator) dari peran serta masyarakat yang dilakukan secara mandiri dalam upaya P4GN di lingkungannya oleh Penggiat Anti Narkoba dari lingkungan instansi pemerintah dan swasta, lingkungan pendidikan (bersumber dari pemangku kebijakan di Sekolah Menengah Atas dan Sekolah). Adapun instrument pengukuran IKM terdiri dari 5 variabel dan 10 Indikator yang menunjukkan sejauh mana, keberdayaan lingkungan menangani P4GN dengan indikator (1) adanya penggiat anti narkoba; (2) adanya metode; (3) adanya anggaran; (4) adanya sistem; dan (5) adanya sarana prasarana.

Melalui pembentukan dan pembinaan para penggiat dari lingkungan-lingkungan tersebut, maka setelah lulus dalam Bimtek Pengembangan Kapasitas mereka dibina untuk melakukan aksi mengukur Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) yang secara kuantitas menghasilkan IKP dan secara kualitas menghasilkan produk, seperti produk hukum atau regulasi di lingkungannya.

Dari hasil pengukuran indeks tersebut, pada TA 2022, BNN Kota Jakarta Timur berhasil mengantarkan indeks:

Tabel 3.5. Indeks Kemandirian Partisipasi BNNK Jaktim TA 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosen
4.	Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)	3,10	3,27	105,48%

Dari tabel 3.5 di atas menunjukkan bahwa target skala IKP yang seharusnya dicapai 3,10 (berskala mandiri) berhasil dilaksanakan penanganan P4GN di lingkungan para penggiat sebesar 3,27 (sangat mandiri) atau melebihi yang

ditargetkan atau sebesar 105,48%. Adapun secara kualitas, capaian riil di lapangan, dari para penggiat menghasilkan regulasi yang mendukung terwujudnya lingkungan bersinar, sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 3.4. Kegiatan P2M Indeks Kemandirian Partisipasi Pendidikan



Gambar 3.5. Kegiatan P2M Indeks Kemandirian Partisipasi Masyarakat

5

Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba

Sebagaimana diketahui strategi *war on drugs* dalam P4GN perlu melakukan *soft power approach/SPA* (pendekatan memanusiaikan manusia) yaitu pendekatan dimana manusia sebagai kekuatan yang mampu mengubah kondisi lingkungan dan kawasan yang bersih narkoba harus terus ditingkatkan potensinya. Pada kondisi normal, SPA menjadikan metode pencegahan sebagai *tool* untuk membuat manusia pasif menjadi aktif, metode pemberdayaan sebagai *tool* untuk membuat manusia aktif berdaya untuk menjadi aktifis atau penggiat. Selanjutnya, pada kondisi terpapar narkoba, manusia yang berstatus sebagai korban dan penyalah-guna harus tetap dipulihkan dengan metode rehabilitasi.

Pada sasaran ke-5 yaitu meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba, digunakan 2 indikator untuk mengukurnya, yaitu: (1) Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional dan (2) Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM), sebagaimana diuraikan dalam penjelasan berikut ini.

Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional

Rehabilitasi bagi pecandu, pengalahguna dan korban penyalahguna narkoba merupakan suatu proses pemulihan di lembaga rehabilitasi atas gangguan ketergantungan penyalahgunaan narkoba baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang yang bertujuan merubah perilaku dan mengembalikan fungsi individu di masyarakat serta memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan.

Untuk mencapai sasaran kinerja tersebut perlu adanya peningkatan lembaga rehabilitasi yang operasional. Untuk melihat operasional atau tidaknya lembaga rehabilitasi, perlu fasilitas rehabilitasi yang dilihat dengan indikator adanya pelayanan lembaga tersebut dalam merehabilitasi penyalahguna, korban dan pecandu narkoba. Adapun capaian keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Jakarta Timur Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.6. Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang operasional BNNK Jaktim TA 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosen
5.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	4	4	100%

Dari tabel 3.6 di atas menunjukkan bahwa target jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional hingga akhir Desember 2022 di Jakarta timur yang ditargetkan berjumlah 4 lembaga dan dapat direalisasikan dengan jumlah 4 lembaga (100%). Untuk mewujudkan rehabilitasi yang operasional BNN Kota Jakarta Timur melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan bagi lembaga rehabilitasi narkoba melalui bimbingan teknis serta melakukan pendekatan dan kesepakatan akan layanan ke-4 lembaga tersebut untuk melayani rehabilitasi.

Adapun ke-4 lembaga tersebut, antara lain: (1) Yayasan Karisma, (2) Yayasan Madani, (3) Yayasan Balarenik, (4) Yayasan Kelima. Beberapa kegiatan terkait dengan fasilitasi rehabilitasi tergambar dalam dokumen foto.



Gambar 3.6. Lembaga rehabilitasi yang operasional

6

Meningkatnya Aksestabilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika

Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) merupakan suatu program yang berupaya menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan intervensi kepada masyarakat yang telah menggunakan narkoba. Dimana intervensi ini berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat sehingga keterbatasan akses terhadap rehabilitasi karena faktor geografis, stigma maupun biaya dapat diminimalisir.

Melalui IBM penanganan pecandu menjadi terdepan dan terdekat yang berada di tengah masyarakat. IBM akan secara langsung berinteraksi dengan pengguna narkoba, keluarga dan masyarakat sekitar. Hal ini dapat membuat intervensi yang dilakukan IBM menjadi semakin efektif, karena pengguna narkoba beserta keluarga tidak perlu pergi ke tempat lain yang mungkin menjadi hambatan.

Adapun Capaian keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Jakarta Timur Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.7. Jumlah unit penyelenggara Layanan Rehabilitasi (IBM) BNNK Jaktim TA 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosen
5.	Jumlah unit penyelenggara Layanan Rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)	6	6	100%

Dari tabel 3.7 di atas menunjukkan bahwa target jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang ditargetkan 6 unit dan direalisasi dengan persentase penuh 100%. 6 unit penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM tersebut antara lain (1) IBM Pulo Gebang, (2) IBM Kebon Manggis, (3) IBM Penggilingan, (4) IBM Cawang, (5) IBM Lubang Buaya, dan (6) IBM Palmeriam. Berikut Gambaran kegiatan layanan rehabilitasi IBM.



Gambar 3.7. Kegiatan Layanan Rehabilitasi IBM

7

Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik Rehabilitasi

Unsur penting dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi adalah peningkatan kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi. Untuk mengukur skala peningkatan, maka digunakan Indeks Kepuasan Masyarakat. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Kepuasan Layanan Masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.Pan/2/2004.

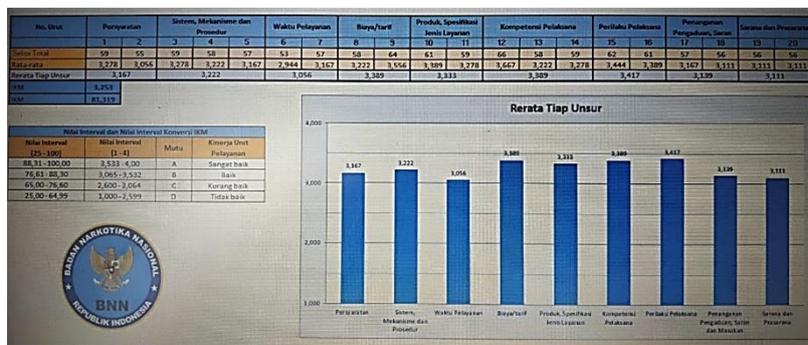
Adapun instrumen IKM terdiri dari 14 unsur sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut: (1) prosedur pelayanan; (2) Persyaratan Pelayanan; (3) Kejelasan petugas pelayanan; (4) Kedisiplinan petugas pelayanan; (5) Tanggung jawab petugas pelayanan; (6) Kemampuan petugas pelayanan; (7) Kecepatan pelayanan; (8) Keadilan mendapatkan pelayanan; (9) Kesopanan dan keramahan petugas; (10) Kewajaran biaya pelayanan; (11) Kepastian biaya pelayanan; (12) Kepastian jadwal pelayanan; (13) Kenyamanan lingkungan; dan (14) Keamanan Pelayanan.

Adapun Capaian keberhasilan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BNN Kota Jakarta Timur Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.8. Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNNK TA 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosen
8.	Indeks Kepuasan Layanan Klinik Rehabilitasi BNNK Kota Jakarta Timur	3,3	3,3	100%

Dari tabel 3.8 di atas menunjukkan bahwa target skala IKM sebesar 3,3 berhasil dilaksanakan penilaian IKM pada layanan rehabilitasi sebesar 3,3 atau dengan kata lain tercapai 100%.



Gambar 3.8. Hasil Penilaian IKM

8 Meningkatkan pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

Dalam rangka mendukung strategi *War On Drugs* melalui *Hard Power Approach*, upaya pemberantasan melalui pengungkapan jaringan, pemutusan mata rantai peredaran, pemeriksaan *entry point*, penuntutan tersangka dan penyitaan aset bandar narkoba harus terus dilakukan seiring berjalannya *soft power approach* dan *smart power approach*.

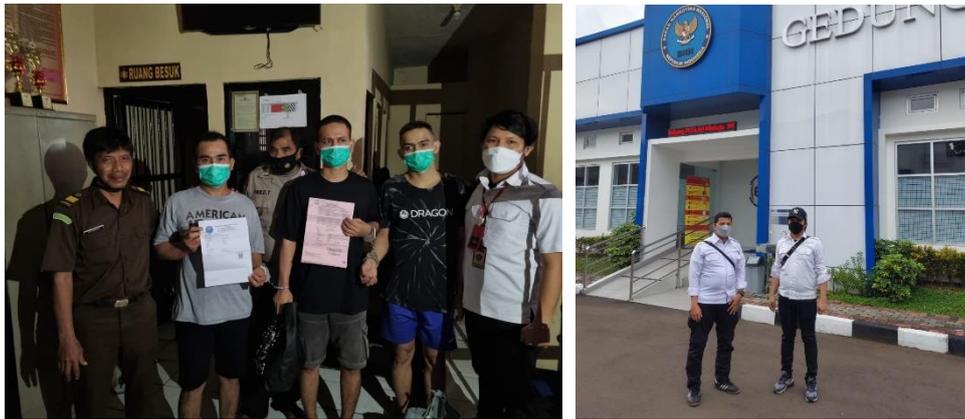
Oleh karenanya diperlukan peningkatan pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya. Dalam upaya mengungkap tindak pidana narkotika perlu sasaran kinerja agar meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dari tahun ke tahun.

Adapun Pengungkapan tindak pidana narkotika yang terungkap diukur menggunakan jumlah Laporan Kasus Narkotika (LKN). Pada Tahun 2022 BNN Kota Jakarta Timur memiliki 1 target pengungkapan kasus tindak pidana narkotika

Tabel 3.9. Jumlah Berkas perkara pidana yang P-21 BNNK Jaktim TA 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosen
8.	Jumlah Berkas perkara pidana narkotika dan precursor narkotika yang P-21	1	1	100%

Dari tabel 3.9 di atas menunjukkan bahwa target jumlah berkas perkara pidana narkotika dan precursor narkotika yang P-21 yang ditargetkan 1 berkas tercapai 1 berkas (100%). Sebagaimana digambarkan dalam kegiatan berikut ini.



Gambar 3.9. Kegiatan Pemberantasan dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika

9

Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien

Salah satu indikator pelaksanaan manajemen dalam pengelolaan program dan anggaran pemerintah adalah proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien. Untuk mengukur indikator tersebut dalam Kinerja Anggaran BNN dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA/KL.

Adapun Nilai Kinerja Anggaran BNNK Jakarta Timur pada TA 2022, adalah:

Tabel 3.10. Nilai Kinerja Anggaran BNNK Jaktim TA 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosen
9.	Nilai Kinerja Anggaran	88	96,40	109,55%

Dari tabel 3.10 di atas menunjukkan bahwa target nilai kinerja anggaran BNNK Jakarta Timur yang ditargetkan 88 baru teralisasi sebesar 96,40 (109,55%). Adapun kendala yang dihadapi sebagai faktor kurang tercapainya target, antara lain: kebijakan pemerintah yang tidak konsisten terkait izin buka tutup blokir anggaran yang mengakibatkan keraguan pada saat penyerapan anggaran.

10

Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Untuk melaksanakan program dan kegiatan P4GN juga diperlukan tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur. Oleh karenanya, sebagai sasaran ke-10, yaitu meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur, indikator tersebut diukur dengan nilai IKPA (Indikator Kinerja Penetapan Anggaran).

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan perencanaan anggaran kualitas anggaran.

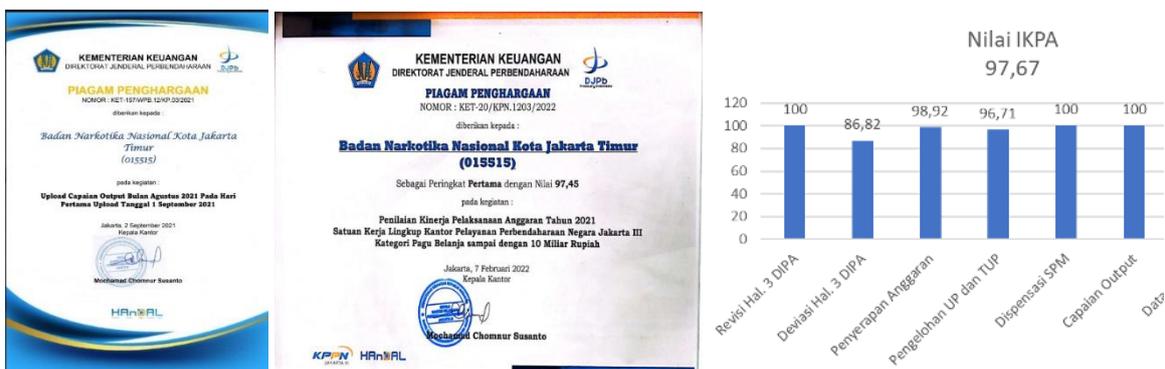
Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Perhitungan Capaian Output ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO. Selain itu juga terdapat penyesuaian aspek dan 8 (delapan) indikator kinerja dalam IKPA.

Adapun nilai IKPA BNN Kota Jakarta Timur Tahun 2022 adalah sebesar 97,67 atau 102,81% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.11. Nilai Indikator IKPA BNNK Jaktim TA 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosen
10.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95	97,67	102,81%

Dari tabel 3.11 di atas menunjukkan bahwa target skala IKPA yang seharusnya ditargetkan mencapai 95 ternyata capaiannya melampaui target yaitu 97,67 atau 102,81%. Faktor keberhasilan ini didukung, antara lain: meningkatnya kepatuhan dan disiplin dalam kinerja penyerapan anggaran yang memperhatikan kebutuhan, waktu, ketepatan pembayaran dan kevalidan laporan pertanggungjawaban keuangan.



Gambar 3.10. Nilai IKPA BNNK Jakarta Timur & beberapa piagam penghargaan

Adapun Pagu Anggaran pada BNNK Jakarta Timur pada TA 2022 sebesar Rp. 1.907.199.000,- (*satu milyar sembilan ratus tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*), terdiri dari belanja barang sebesar Rp. 1.856.999.000 dan belanja modal sebesar Rp. 50.200.000. Capaian penyerapan anggaran TA 2022 telah diserap 96,40% yaitu sebesar Rp. 1.838.603.481,- (*satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah*) terdiri dari belanja barang sebesar Rp. 1.788.423.481,- (*satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah*) dan belanja modal sebesar Rp. 50.180.000 (*lima puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah*).

Jika dibanding dengan TA 2021 yang terealisasi 96,34%, maka terjadi kenaikan penggunaan anggaran sebesar 0,06%. Adapun kenaikan sebesar 0,06% tersebut disebabkan meningkatnya kepatuhan dan disiplin dalam kinerja penyerapan anggaran yang memperhatikan kebutuhan, waktu, ketepatan pembayaran dan kevalidan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Tabel 3.12. Pagu dan Realisasi Anggaran BNNK Jaktim TA 2022

NO	BAGIAN	PAGU	REALISASI	%
1.	Subbag Umum	1.184.519.000	1.147.983.481	96,92%
2.	Cegah & Dayamas (P2M)	446.335.000	415.220.000	93,03%
3.	Rehabilitasi	180.080.000	179.380.000	99,61%
4.	Pemberantasan	96.265.000	96.020.000	99,75%
	Total	1.907.199.000	1.838.603.481	96,40%

Adapun sisa anggaran sebesar Rp 68.595.519 atau 3,60% sebagai efisiensi anggaran yang dalam pelaksanaannya terkendala dengan beberapa faktor, antara

lain : (1) deviasi hal III DIPA cukup besar; (2) terdapat beberapa kegiatan tidak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pada hal III DIPA; dan (3) terdapat anggaran yang terblokir.

Rekomendasi untuk antisipasi agar anggaran lebih optimal di TA 2023 adalah dengan melakukan langkah-langkah, antara lain : (1) melakukan revisi hal III DIPA per triwulan; (2) meningkatkan koordinasi dengan pelaksana kegiatan tentang timeline pelaksanaan kegiatan secara berkala; (3) melanjutkan poin kinerja IKPA yang sudah berjalan dengan baik; dan (4) meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran terutama anggaran PN.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Satuan Kerja Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Timur BNNK mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kota Jakarta Timur, seperti diatur dalam dalam Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020
2. Dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategi dengan 10 (sepuluh) Indikator, semua program dan kegiatan telah dilaksanakan semuanya (100%) dengan capaian kinerja program TA 2022 sebesar 106,32% atau meningkat 7,15% dari tahun 2021.
3. Adapun faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja program pada TA 2022, antara lain: (1) tumbuhnya soliditas antara sub satker dalam bahu membahu bersinergi dalam P4GN di masyarakat; (2) meningkatnya koordinasi dan komunikasi masing-masing sub satker dengan stakeholder dan OPD; dan (3) Pembinaan yang intensif oleh pembina P4GN di BNN RI dan BNNP yang secara rutin yang meningkatkan kerja dan kinerja dalam P4GN;
4. Sementara dari alokasi pagu anggaran sebesar 1.907.199.000,- (*satu milyar sembilan ratus tujuh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) telah berhasil diserap 96,40% atau sebesar Rp. 1.838.603.481,- (*satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah*) atau meningkat sebesar 0,06% dari TA 2021.
5. Adapun faktor pendukung dari keberhasilan kinerja anggaran pada TA 2022, antara lain: (1) merencanakan kegiatan secara matang terukur & terstruktur; (2) meningkatnya kepatuhan dan disiplin dalam kinerja penyerapan anggaran yang memperhatikan kebutuhan, waktu, ketepatan pembayaran dan kevalidan laporan pertanggungjawaban keuangan; dan (3) membangun komunikasi efektif antara KPA, PPK, Bendahara dan pelaksana Kegiatan.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

1. Situasi dan keadaan pada TA 2022 dirasakan masih sama dengan kondisi TA 2021 dimana kondisi bangsa masih bergelut dan berkuat berjuang melawan pandemi covid yang tidak mudah dalam pelaksanaan program dan anggaran. Oleh karenanya, pengalaman terbaik pelaksanaan dan pencapaian kinerja Program dan anggaran TA 2022 harus terus dijadikan pembelajaran.
2. Beberapa pelaksanaan program yang bersifat non DIPA tetapi tidak kalah strategisnya juga harus mendapatkan perhatian, seperti pelaksanaan inpres 2/2020, menggelorakan *war on drugs* melalui instrument sosialisasi lagu mars BNN dan melakukan advokasi terkait pelaksanaan kebijakan kota tanggap ancaman narkoba dan perwujudan desa dan kelurahan bersih narkoba.
3. Perlunya peningkatan kegiatan internal untuk memperkuat soliditas melalui *capacity building* sebagai upaya meningkatkan semangat kerja, menginternalisasi dan membudayakan sifat Berani, Nasionalis, Netral, Responsive dan Inovatif secara professional dan proporsional dengan kesadaran dan kepedulian yang lebih tinggi.

Rekomendasi untuk antisipasi agar anggaran lebih optimal di TA 2023 adalah dengan melakukan langkah-langkah, antara lain : (1) merencanakan kegiatan secara matang terukur & terstruktur; (2) meningkatnya kepatuhan dan disiplin dalam kinerja penyerapan anggaran yang memperhatikan kebutuhan, waktu, ketepatan pembayaran dan kevalidan laporan pertanggungjawaban keuangan; (3) membangun komunikasi efektif antara KPA, PPK, Bendahara dan pelaksana Kegiatan; dan (4) memanfaatkan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Jakarta, Januari 2023

Kepala BNNK Jakarta Timur



Hendrajid Putut Widagdo, S.Sos.,MM., M.Si